



**PERAN PANCASILA DALAM MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI  
ANTAR UMAT BERAGAMA DILINGKUNGAN MASYARAKAT**

***THE ROLE OF PANCASILA IN BUILDING AN ATTITUDE OF  
TOLERANCE BETWEEN RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE  
COMMUNITY ENVIRONMENT***

**Alfioni Azahra<sup>1</sup>, Dea Ariesta<sup>2</sup>, Meitya Rachdaika<sup>3</sup>, Nurul Pratiwi<sup>4</sup>, Pami Jeciou Purba<sup>5</sup>,  
Triwanti R Hasibuan<sup>6</sup>, Windi Dwi Ningsih<sup>7</sup>, Taufiq Ramadhan<sup>8</sup><sup>1</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan

Email : [alfioniazahra11@gmail.com](mailto:alfioniazahra11@gmail.com)<sup>1</sup>, [dheaariesta411@gmail.com](mailto:dheaariesta411@gmail.com)<sup>2</sup>, [rmeitya05@gmail.com](mailto:rmeitya05@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nurulpratiwi1614@gmail.com](mailto:nurulpratiwi1614@gmail.com)<sup>4</sup>, [pamijecioupurba@gmail.com](mailto:pamijecioupurba@gmail.com)<sup>5</sup>, [triwanti.hasibuan06@gmail.com](mailto:triwanti.hasibuan06@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[windidwiningsih@gmail.com](mailto:windidwiningsih@gmail.com)<sup>7</sup>, [TaufikRamadhan@unimed.ac.id](mailto:TaufikRamadhan@unimed.ac.id)<sup>8</sup>.

Article Info

Article history :

Received :15-06-2024

Revised :17-06-2024

Accepted :19-06-2024

Published:23-06-2024

**Abstract**

*Pancasila as the foundation of the state Indonesia has an important role in shaping the attitude of tolerance between religious communities religion. Pancasila, with its principles that emphasize on humanity, unity, and social justice, provides a moral and ethical foundation that supports inter-religious ethics that support inter-religious harmony. This paper analyzes how Pancasila, through its principles, can be used as a tool to educate and promote interfaith to educate and promote interfaith tolerance. With this approach, it is hoped to create a more inclusive and tolerant environment, where individuals can live in freedom and tolerance environment, where every individual can live in freedom and justice without discrimination. Pancasila has great potential to be an effective tool in building inter-religious tolerance. Through understanding and application of the values of Pancasila, it is expected to increase harmony and unity among religious communities in Indonesian society. unity among religious communities in Indonesian society. The author uses a descriptive qualitative research method with a literature study. Data collection techniques are carried out with qualitative method through literature study, or what is often referred to as Literature Review, is a research approach that uses secondary data in the form of literature, journals, books, scientific articles, and other documents. Literature, journals, books, scientific articles, and other documents as the main source of information.*

**Keywords : Pancasila, Tolerance, Society**

**Abstrak**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleransi antar umat beragama. Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan pada kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, menyediakan landasan moral dan etika yang mendukung kerukunan



antar umat beragama. Makalah ini menganalisis bagaimana Pancasila, melalui prinsip-prinsipnya, dapat dijadikan sebagai alat untuk mengedukasi dan mempromosikan toleransi antar umat beragama. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran, di mana setiap individu dapat hidup dalam kebebasan dan keadilan tanpa diskriminasi. Pancasila memiliki potensi besar untuk menjadi alat yang efektif dalam membangun sikap toleransi antar umat beragama. Melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat meningkatkan kerukunan dan kesatuan antar umat beragama dalam masyarakat Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, atau yang sering disebut dengan Literature Review, adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder berupa literatur, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya sebagai sumber utama informasi.

**Kata Kunci : Pancasila, Toleransi, Masyarakat**

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk ataupun dapat disebut dengan bangsa multicultural yang didalamnya ada berbagai keanekaragaman baik dari segi agama, ras, suku, budaya, bahasa, serta lainnya. Maka dari itu, negara Indonesia sangat cocok memiliki julukan a multicultural country. Konsep plural-multikultural telah dideskripsikan bangsa Indonesia dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Arti semboyan ini mencerminkan persatuan dan kesatuan dari keberagaman budaya, suku, ras, bahasa, agama, dan kepercayaan yang dipunyai bangsa Indonesia. Negara Indonesia mempunyai suatu identitas nasional menjadi bangsa multikultural yang kehidupan bangsanya menjunjung tinggi sikap toleransi, hal ini yang memberikan perbedaan negara Indonesia dengan negara lainnya. Sikap toleransi tersebut sebagai modal utama di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memandang masyarakat yang sangat majemuk menjadikan keharmonisan kehidupan bangsa Indonesia mampu terlindungi dan terbangun.

Dalam masyarakat sedemikian pluralnya setiap individu diharapkan dapat menjunjung tinggi sikap toleransi, saling menghargai, dan bersedia menerima perbedaan yang muncul disekitar lingkungannya. Sikap toleransi ini menjadi suatu kunci utama dalam mewujudkan kehidupan yang beranekaragam. Keanekaragaman yang dipunyai oleh negara Indonesia akan lebih indah dan bermanfaat jika dikendalikan dengan cermat mengarah pada kondisi lebih baik. Dengan mengimplementasikan sikap toleransi memiliki tujuan agar terbentuknya kehidupan yang menjunjung persatuan tanpa memandang adanya perbedaan dan latar belakang. Toleransi bukan saja didefinisikan sebagai sikap namun juga sebagai kesadaran dan cara berpikir yang memaksa kemauan diri untuk menerima dan menghormati perbedaan (Shofa, 2022:673). Dalam kehidupan bermasyarakat yang serba majemuk ini muncul perbedaan-perbedaan yang ada seperti, budaya, suku, ras, agama, bahasa, dan golongan hal tersebut adalah sebuah fakta yang perlu diperhatikan agar selalu memajukan bangsa Indonesia dan mengarah cita-cita negaraberprinsip pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945.



Ekstremisme agama menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah maraknya oknum masyarakat yang terlibat dalam ekstremisme agama (Laba & Saingo, 2023). Fenomena ini menciptakan kekhawatiran akan potensi ancaman terhadap stabilitas sosial, toleransi, dan keamanan nasional. Stabilitas sosial, toleransi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran dan potensi Pancasila sebagai alat untuk mengatasi dan mencegah ekstremisme agama di Indonesia.

Eksistensi masyarakat Indonesia identik dengan kemajemukan yang harus dilindungi dalam ikatan persatuan, tanpa adanya tindakan diskriminasi, intoleran, sentimen terhadap pihak-pihak yang berbeda. Meskipun terdapat berbagai bentuk keberagaman, masyarakat Indonesia memiliki semangat gotong royong dan rasa persatuan yang kuat. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tapi tetap satu", merupakan semboyan nasional yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Meskipun beragam agama, masyarakat Indonesia umumnya dikenal sebagai masyarakat yang toleran terhadap perbedaan agama. Terdapat tradisi saling menghormati dan merayakan perayaan keagamaan bersama antar komunitas agama.

Menurut (Shofa, 2022:146) Pancasila disahkan menjadi sebuah dasar negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika oleh pendiri bangsa, sampai saat ini mampu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Pancasila ialah nilai yang dipergunakan kepada warga masyarakat untuk melaksanakan kehidupan yang berbangsa, dan bernegara. Karena nilai-nilai Pancasila ini ialah kepribadian bangsa Indonesia, dari sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia sekarang. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila mesti dilindungi serta diterapkan kepada generasi-generasi selanjutnya sampai eksistensi nilai-nilai Pancasila dapat terealisasi ke dalam jiwa dan jati diri ke masyarakat. Upaya untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup masyarakat yaitu, melibatkan masyarakat dalam aktivitas atau kegiatan yang mengedepankan antusias sikap toleransi dan kebangsaan.

Sikap toleransi dalam beragama tentunya penilaian positif bagi negara Indonesia untuk menuju suatu negara yang taat dan berlandaskan Pancasila. Namun, sikap intoleransi menjadi pemicu buruk bagi negara Indonesia yang menyebabkan Indonesia menjadi buruk dan mengesampingkan setiap nilai yang ada pada sila Pancasila. Sikap intoleransi berarti sikap yang menunjukkan keacuhan, tidak menghargai dan tidak mengakui suatu kebebasan beragama seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 29 ayat (2), yakni "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama".

## **METODE PENELITIAN**

Dalam pembuatan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, atau yang sering disebut dengan Literature Review,



adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder berupa literatur, jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen lainnya sebagai sumber utama informasi. Kemudian data-data dianalisis, diklasifikasikan dan dideskripsikan untuk sampai pada sebuah kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multicultural. Menurut Akhmadi (dalam Derung dkk. 2022:259). Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan, namun kemajemukan ini dapat menjadi tantangan jika tidak ditanggapi dengan kebijaksanaan, karena dapat menjadi ancaman dan membawa konflik yang membuat perseteruan di lingkungan masyarakat. Keragaman budaya adalah kejadian alami karena pertemuan macam-macam budaya di suatu tempat, dengan individu-individu dan kelompok-kelompok dengan membawa budaya masing-masing, sehingga memiliki cara yang khas dalam hidupnya.

### **Hubungan Agama Dalam Pancasila**

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” [Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945] sertapenempatan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaisila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu: Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan danpersaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi faktor penting untuk mempereratpersatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadapnilai-nilai ”Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kedua, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 diYogyakarta berkesimpulan Arianto (dalam Shaleh & Fifiana 2019: 246) bahwa sila”Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebab yangpertama atau causa prima dan sila ”Kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegarauntuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti, ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negaradari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dibaca sebagain satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi bahwa: Pancasila adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang dipersatuan Indonesia (berkebangsaan) yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dipersatuan Indonesia (berkebangsaan),yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (3) Persatuan Indonesia (kebangsaan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial; (4) Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang dipersatuan Indonesia (berkebangsaan) dan berkeadilan sosial; (5) Keadilan sosial, yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,



yang mempersatukan Indonesia (berkebangsaan) dan berkerakyatan. Ini berarti bahwa sila-sila lain dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mengejewantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan.

Keempat, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak “Ketuhanan Yang Maha Esa”, seperti komunisme dan atheisme. Karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual.

### **Peran Pancasila dalam membangun toleransi antar umat beragama**

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta dan selalu terbina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Masyarakat diharapkan mampu berkembang dan memiliki nilai-nilai dan karakter pancasila terutama ketika didalam lingkungan masyarakat. Karakter ataupun kepribadian masyarakat yang baik sesuai dengan nilai pancasila sendiri adalah sebagai berikut Menurut Hani Risdiyany (dalam Tamba dkk. 2023: 99).

1. Memiliki toleransi yang tinggi, menghormati dan menghargai keberagaman suku, budaya, dan agama.
2. Memiliki kegiatan sosial dan aktif dalam kegiatan tersebut, seperti kerja bakti, ronda malam, penyuluhan , ataupun kegiatan-kegiatan amal.
3. Memiliki integritas sebagai pemimpin dan memiliki kualitas kepemimpinan yang berlandaskan pada pancasila dan kebijaksanaan dalam memimpin suatu forum.
4. Mendukung proses bermusyawarah dan pengambilan keputusan yang kolektif, seperti dalam forum maupun organisasi sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang ada di lingkungan masyarakat.
5. Memiliki hati nurani dan mewujudkannya dalam tindakan yang nyata, seperti membela dan memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta bertanggung jawab terhadap tindakan pribadi yang lalai dan mematuhi hukum dan norma-norma yang berlaku.

### **Perwujudan sikap toleransi antar umat beragama di masyarakat**

Pada dasarnya toleransi adalah sikap menerima perbedaan, baik dari sosial maupun agama. Dengan menghargai sebuah perbedaan baik itu dari individual maupun kelompok. Dengan adanya toleransi maka tidak akan terjadi sebuah perpecahan pada masyarakat individu atau kelompok.

Menurut W.J.S Poerwadarminta toleransi yaitu sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan lain sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri. Contohnya ialah toleransi agama, suku,



ras, dan sebagainya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa toleransi yaitu sikap menghargai dan menerimaperbedaan yang dimiliki oleh orang lain.

Dalam menerapkan toleransi beragama kita harus mempunyai prinsip mencapai kebahagiaan dan ketentraman yaitu:

1. Kebebasan beragama Kebebasan merupakan hak yang fundamental bagi manusia hal ini membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yang paling essensial pada kehidupan adalah kebebasan dalam berfikir maupun kebebasan berkehendak dan kebebasan hak memilih.
2. Penghormatan dan Eksistensi Agama lain Memberikan kebebasan dalam beragama merupakan sikan menghormati eksistensi agama lain dengan memberikan sebuah pengertian untuk menghormati keberagaman dan perbedaan ajaran-ajaran pada setiap agama, hal ini merupakan etika yang harus dilaksanakan dari sebuah sikap toleransi.
3. Agree in Disagreement (Setuju di dalam Perbedaan) Menurut Mukti Ali (dalam Arfiansyah dkk. 2022: 163), prinsip tentang perbedaan yaitu perdamaian dan tidak ada permusuhan antar pemeluk agama lain, karena sebuah perbedaan pasti ada pada dunia ini dan sebuah perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan.

Masyarakat memiliki kewajiban untuk selalu memelihara keharmonisan hubungan antar umat beragama yaitu dengan menjaga sikap, empati, koreksi diri, dan siapk terbuka untuk merubah keadaan yang tidak tepat sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Juga pada masyarakat perlu mengembangkan toleransi antar umat beragama diantaranya:

1. Peningkatan akan pemahaman, penghayatan, implementasi akan wawasan kebangsaan yang tentunya berkaitan dengan masalah toleransi.
2. Mematangkan iman
3. Mengembangkan toleransi antar umat beragama
4. Peningkatan akan pemahaman, penghayatan, implementasi akan kekeluargaan antar agama
5. Meningkatkan dialog timbal balik antar umat beragama

### **Peran Pancasila dalam menciptakan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia**

Pancasila berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bagi bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Prinsip persatuan Indonesia mendorong rasa nasionalisme dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari Sila ke I sampai Sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain: Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan



sebagainya. Contohnya: Menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya; selalu menjaga kebersihan dan sebagainya Menurut Dedees ( dalam Sianturi & Dinie 2021:225).

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut: Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya.

Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme); Pengakuan terhadap Ke Bhinneka Tunggal Ika dan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa; Cinta dan bangga akan bangsa dan Negara Indonesia (nasionalisme) Menurut Sutiyono (dalam Sianturi & Dinie 2021:225).

Dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni: Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup; Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan, Masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

### **Sila Pancasila yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama**

Konflik Poso dapat dikatakan sebagai konflik agama yang serius karena tidak menemukan jalan untuk mendamaikan kedua pihak. Konflik ini terjadi sebanyak tiga kali di Kota Poso, Sulawesi Tengah.

Konflik pertama terjadi pada 25 sampai 29 Desember 1999, konflik kedua pada 17 sampai 21 April 2000, dan konflik ketiga pecah pada tanggal 16 Mei sampai 15 Juni 2000.

Dalam butir 2 dari Sila Pertama berbunyi, mengembangkan sikap hormat menghormati bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda beda sehingga terbina kerukunan. Adapun landasan hukum daripada toleransi antarumat beragama adalah:

1. Landasan Idil, yaitu Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan Pasal 29 ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".



3. Landasan Operasional yaitu Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Larangan dan Pencegahan Penodaan dan Penghinaan Agama.

Toleransi antarumat beragama di Indonesia populer dengan istilah kerukunan hidup antarumat beragama. Istilah tersebut merupakan istilah resmi yang dipakai oleh pemerintah. Kerukunan hidup umat beragama merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang keagamaan di Indonesia. Gagasan ini muncul terutama dilatarbelakangi oleh meruncingnya hubungan antarumat beragama.

Adapun sebab-musabab timbulnya ketegangan intern umat beragama, antarumat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek antara lain:

1. Sifat dari masing-masing agama, yang mengandung tugas dakwah atau misi;
2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain;
3. Para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain;
4. Kaburnya batas antara sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.
5. Kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah; dan
6. Kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat Menurut Kemenag (dalam Nur 2019:43).

Dalam pembinaan kehidupan beragama, pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tetapi juga menjamin, membina, mengembangkan, serta memberikan bimbingan dan pengarahan agar kehidupan beragama lebih berkembang, semarak, dan serasi dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, teori pembinaan kerukunan hidup beragama diarahkan pada konsep trilogi kerukunan, yaitu:

1. Kerukunan intern umat beragama yaitu terkait dengan adanya perbedaan mazhab, ormas keagamaan, penafsiran, cara pandang maka pada konsep ini mengupayakan berbagai cara agar tidak saling klain kebenaran guna menciptakan kehidupan beragama yang tenteram, rukun, dan penuh kebersamaan.
2. Kerukunan antarumat beragama memiliki pengertian kehidupan beragama yang tenteram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya.; dan
3. Kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah, bekerjasama dan bermitra dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa Menurut Kemenag, (dalam Nur 2019:43).





Usaha pembinaan kerukunan umat beragama melalui dialog pemuka agaman diprogramkan tidak hanya sebagai ajang pertukaran pendapat semata, tetapi harus diberi bobot sebagai usaha musyawarah bersama pemuka-pemuka umat berbagai agama dalam rangka menciptakan kerukunan inter dan antarumat beragama.

Pembinaan kehidupan beragama tetap dalam kerangka pembinaan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menumbuhkan kesadaran beragama bagi setiap pemeluknya. Kesadaran beragama itu tidak saja mewujud dalam kepekaan moral, melainkan juga dalam kepekaan sosial, sehingga dengan demikian tidak membuat fanatisme dan eksklusivisme, melainkan menumbuhkan toleransi sosial dan sikap terbuka.
2. Negara menjamin kebebasan beragama dan bahkan berusaha membantu pengembangan kehidupan beragama dalam rangka pembangunan. Masing-masing umat beragama memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk menjalankan dan mengembangkan kehidupan agama mereka

## **KESIMPULAN**

Indonesia, dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang dimilikinya, menunjukkan dirinya sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman ini menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan. Namun, kemajemukan ini juga dapat menjadi tantangan jika tidak ditanggapi dengan bijaksana, karena dapat menjadi ancaman dan memicu konflik di lingkungan masyarakat. Keragaman budaya adalah kejadian alami karena pertemuan berbagai budaya di suatu tempat, dengan individu-individu dan kelompok-kelompok yang membawa budaya masing-masing. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Penempatan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila memiliki beberapa makna. Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itu, diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penyusunan jurnal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut membantu dan mendukung, khususnya kepada Bapak Taufik Ramadhan. S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Penulisan Akademik dan Publikasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adelina, Nini Tanamal. 2016. Implementasi Nilai Pancasila dalam Menangani Intoleransi di Indonesia. Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Vol. 8 no.3, 1-8.



- Anandari Anatansyah Ayomi dan Dwi Afriyanto. 2022. Urgensi Sikap Toleransi Umat Beragama dalam Transformasi Masyarakat Era Society 5.0 Perspektif Islam. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol 11(1).
- Arfiansyah dkk. 2022. Toleransi Antar Umat Beragama Di Masyarakat Desa Jarak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 2(2). 162-166.
- Derung dkk. 2022. Membangun Toleransi Umat Beragama dalam Masyarakat yang Majemuk. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*. Vol 2(8). 258-263.
- Fitriani, shofiah. 2020. Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Studi Keislaman*, vol 20. No. 2, h 179-192.
- Hartani Mallia & Soni Akhmad Nulhaqim. 2020. Analisis Konflik Antar Umat Beragama Di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Vol 2(2).
- Ginting, Widiyari, Widodo. 2 Desember 2023. Peran Kampung Pancasila Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Toleransi di RW 03 Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol 7(2).
- Nur Irayanti. 2019. Penerapan Nilai-nilai Pancasila Melalui Toleransi Antar Umat Beragama Di Desa Batusitanduk Kabupaten Luwu. *Jurnal Pendidikan*. Vol 3(1). 39-50.
- Ryan, Guruh Aulia. 2023. Toleransi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ushuluddin*, vol 25 nomor 1, 18-29.
- Sianturi & Dinie 202. Penerapan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol 5(1). 222-231.
- Shaleh Ali Ismail & Fifiana Wisnaeni. 2019. Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1(2)
- Subandi, S. (2020). Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan. *Harmonia journal of arts research and education*, 11(2), 62082.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Tamba dkk. 2023. Peran Pancasila Dalam Memupuk Persaudaraan Dan Toleransi Mahasiswa Di Kampus. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*. Vol 1(4). 97-103.
- Tlonaen, Saingo. Desember 2023. Peran Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Perilaku Anti Ekstremisme Agama. *Kupang. Jurnal Multidisiplin West Science*. Vol 2(12).
- Utami, S. G. A., & Najicha, F. U. (2022). Kontribusi mahasiswa sebagai agent of change dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(3), 96-101.